



Tantangan dan Solusi Pendanaan Lembaga PAUD: Ketergantungan Iuran Orang Tua dan Minimnya Dukungan Eksternal

Thesa Monica^{1*}, Ismaniar², Lili Dasa Putri³

¹⁻³ Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Penulis korespondensi: thesamonica@gmail.com

Abstract. *This article analyzes the challenges and solutions surrounding funding for Early Childhood Education (ECE) institutions in Indonesia, with a particular focus on the high dependence on parental fees and the limited availability of external support. ECE plays a crucial role in supporting children's development during their early years; however, many institutions struggle with financial instability due to inadequate and inconsistent funding sources. This study uses a literature review approach by synthesizing relevant books, journal articles, government regulations, and institutional reports to provide a comprehensive understanding of the funding landscape. Findings show that most ECE institutions rely heavily on parental contributions, causing financial vulnerability, limiting program development, and reducing access for low-income families. Government assistance through the Operational Education Assistance (BOP) remains insufficient and often delayed. Meanwhile, collaborations with the private sector, CSR programs, and community-based support are still minimal. Financial challenges negatively affect institutions' ability to provide adequate facilities, ensure teacher welfare, and implement holistic-integrative learning programs. The study suggests several solutions, including strengthening financial management capacity, applying participatory budgeting, diversifying funding sources, and initiating creative economic programs such as school bazaars and community partnerships. These strategies are expected to improve sustainability and enhance the quality of ECE services in Indonesia.*

Keywords: *early childhood education; financial management; financing; funding strategies; parental fees.*

Abstrak. Artikel ini menganalisis tantangan dan solusi pendanaan lembaga PAUD di Indonesia, terutama terkait tingginya ketergantungan pada iuran orang tua dan minimnya dukungan eksternal. PAUD memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak pada usia dini; namun banyak lembaga mengalami ketidakstabilan finansial akibat terbatasnya sumber pendanaan yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah buku, jurnal, regulasi pemerintah, serta laporan lembaga terkait untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pendanaan lembaga PAUD. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga PAUD sangat bergantung pada kontribusi orang tua, sehingga rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan terbatas dalam pengembangan program. Bantuan pemerintah melalui dana BOP masih belum mencukupi dan sering terlambat, sementara dukungan dari sektor swasta, program CSR, dan partisipasi masyarakat masih minim. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kesejahteraan pendidik, serta belum optimalnya penerapan layanan PAUD holistik integratif. Artikel ini menawarkan beberapa solusi strategis, seperti peningkatan kapasitas manajemen keuangan, penyusunan anggaran secara partisipatif, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengembangan program kreatif seperti bazar sekolah dan kemitraan masyarakat. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dan kualitas layanan PAUD di Indonesia.

Kata kunci: dana PAUD; iuran orang tua; manajemen keuangan; pembiayaan pendidikan; strategi pendanaan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting bagi pembentukan karakter dan perkembangan anak pada masa usia emas, yaitu usia 0–6 tahun, ketika perkembangan otak berlangsung sangat pesat dan anak memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap rangsangan dari lingkungannya. Pada periode ini, kualitas layanan pendidikan yang diterima anak akan sangat menentukan keberhasilan mereka dalam tahap perkembangan berikutnya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan PAUD melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional PAUD. Regulasi tersebut menegaskan bahwa PAUD bukan hanya pelengkap, tetapi bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, kondisi di lapangan masih menunjukkan berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah persoalan pendanaan lembaga PAUD, terutama yang berstatus swasta dan berjumlah lebih dari 90% dari total lembaga PAUD di Indonesia. Banyak lembaga PAUD menghadapi keterbatasan dana operasional, ketidakpastian bantuan pemerintah, serta minimnya dukungan eksternal dari sektor swasta dan masyarakat luas. Penelitian Safitri dkk. (2025) menunjukkan bahwa sebagian PAUD tidak lagi menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) secara konsisten, sehingga lembaga terpaksa mengandalkan iuran orang tua sebagai sumber pendanaan utama. Ketergantungan tinggi pada iuran orang tua menempatkan lembaga PAUD pada posisi yang rentan; ketika kemampuan ekonomi orang tua menurun, pendapatan lembaga pun berkurang drastis dan mengganggu kelangsungan operasional.

Ketergantungan yang besar terhadap iuran orang tua tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan lembaga, tetapi juga membatasi akses anak dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti layanan PAUD. Hal ini memperlebar kesenjangan pendidikan sejak usia dini dan berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan perkembangan antara anak dari keluarga mampu dan tidak mampu. Selain itu, penyaluran dana BOP dari pemerintah sering mengalami keterlambatan serta besaran bantuannya belum mencukupi kebutuhan ideal lembaga. Ramadhani dkk. (2023) mencatat bahwa dana BOP tidak dapat menutup seluruh kebutuhan seperti honorarium pendidik, pengadaan alat permainan edukatif, perbaikan sarana prasarana, serta pelatihan pendidik. Di sisi lain, peran sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap PAUD masih sangat terbatas, berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang lebih banyak mendapatkan perhatian.

Permasalahan pendanaan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas penyelenggaraan PAUD. Banyak lembaga kesulitan menyediakan sarana prasarana yang memadai, menghadapi kendala dalam memenuhi kesejahteraan pendidik, serta tidak mampu mengembangkan program pembelajaran yang inovatif. Keterbatasan pendanaan juga menghambat pelaksanaan program holistik integratif, padahal layanan PAUD yang ideal harus mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Dampak jangka panjang dari kondisi ini adalah terhambatnya optimalisasi tumbuh kembang anak-anak Indonesia, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas generasi masa depan.

Mengingat kompleksitas persoalan pendanaan PAUD tersebut, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menganalisis masalah secara komprehensif, mulai dari kondisi pendanaan PAUD saat ini, faktor penyebab ketergantungan pada iuran orang tua, hingga minimnya dukungan eksternal dari berbagai pihak. Kajian pendanaan PAUD juga penting untuk merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, termasuk upaya diversifikasi sumber pendanaan dan ide-ide kreatif yang dapat diterapkan lembaga PAUD agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah atau iuran orang tua. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam persoalan pendanaan lembaga PAUD, menjelaskan dampaknya terhadap kualitas layanan, serta menawarkan berbagai solusi strategis dan inovatif untuk meningkatkan keberlanjutan lembaga PAUD.

Manfaat dari kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pengelola PAUD mengenai pentingnya manajemen pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan pendanaan PAUD, bagi sektor swasta untuk meningkatkan kepedulian melalui kemitraan strategis, serta bagi masyarakat untuk memahami pentingnya dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada upaya bersama dalam meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan PAUD di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teori dalam penelitian ini membahas konsep-konsep utama yang berkaitan dengan pendanaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mencakup teori manajemen pembiayaan pendidikan, standar pembiayaan PAUD, sumber pendanaan lembaga PAUD, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan yang relevan. Selain itu, bagian ini juga menguraikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memberikan landasan empiris bagi penelitian ini. Melalui kajian teoritis ini, peneliti berupaya membangun kerangka konseptual yang kuat untuk memahami tantangan pendanaan PAUD secara komprehensif serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan oleh lembaga PAUD.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen pendidikan yang berfungsi menjamin keberlangsungan kegiatan pembelajaran melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Mulyono (2010) mendefinisikan manajemen pembiayaan pendidikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap anggaran pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, Matin (2014) menekankan

bahwa manajemen pembiayaan meliputi proses penataan sumber keuangan, penyaluran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Fattah (2012) juga memperkuat landasan ini dengan menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu penganggaran (budgeting), pembukuan (accounting), dan pemeriksaan (auditing). Ketiga konsep tersebut menjadi dasar penting bagi lembaga PAUD dalam mengelola setiap sumber dana yang diterima maupun dikeluarkan, sehingga meminimalkan risiko ketidakefisienan maupun penyalahgunaan anggaran.

Dalam konteks lebih spesifik, penyelenggaraan PAUD juga diatur melalui Standar Pembiayaan PAUD sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Standar ini memuat ketentuan mengenai biaya operasional dan biaya personal yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan PAUD yang bermutu. Biaya operasional meliputi gaji pendidik, pembelian alat permainan edukatif (APE), pemeliharaan sarana prasarana, serta biaya kegiatan pembelajaran. Sedangkan biaya personal mengacu pada pengeluaran yang ditanggung peserta didik untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar Episode 16 menegaskan penyesuaian satuan biaya BOP PAUD berdasarkan karakteristik daerah, sehingga memungkinkan pengalokasian dana yang lebih adil. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala pendistribusian dan kecukupan dana, sehingga lembaga PAUD belum dapat sepenuhnya mengandalkan pendanaan dari pemerintah. Sumber pendanaan PAUD secara umum dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan atau penyelenggara, masyarakat/orang tua, serta sektor swasta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun, realita menunjukkan bahwa sebagian besar PAUD swasta lebih mengandalkan iuran orang tua dibandingkan sumber pendanaan lainnya. Safitri dkk. (2025) menemukan bahwa iuran orang tua dapat menyumbang hingga 70–80% dana operasional, khususnya pada lembaga yang tidak menerima BOP secara konsisten. Ketergantungan tinggi ini menunjukkan lemahnya diversifikasi pendanaan sehingga lembaga PAUD rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Ramadhani dkk. (2023) juga menemukan bahwa penyaluran BOP sering terlambat, sehingga lembaga harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu atau mengandalkan iuran orang tua untuk menutupi kekurangan dana.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan PAUD terus menunjukkan bahwa kapasitas pengelola memengaruhi efektivitas penggunaan dana. Wulaningsih dan Asriati (2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip kunci dalam mengelola keuangan pendidikan. Mereka menemukan bahwa lembaga PAUD yang menerapkan

transparansi dalam pelaporan keuangan mampu membangun kepercayaan orang tua dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif. Sementara itu, Gunawan dan Benty (2017) menyoroti pentingnya prinsip keadilan, partisipatif, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan lembaga PAUD untuk melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran serta menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan yang terus berkembang tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selain teori dan regulasi, penelitian empiris lain memperlihatkan bahwa diversifikasi sumber pendanaan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan lembaga PAUD. Nurhasanah dan Nuraeni (2021) menemukan bahwa lembaga PAUD yang memiliki lebih banyak sumber pendanaan selain iuran orang tua cenderung lebih stabil secara finansial dan mampu menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada satu sumber dana tidak hanya membahayakan keberlanjutan lembaga, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada anak.

Berdasarkan uraian teoritis dan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan pendanaan PAUD merupakan isu multidimensional yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kapasitas pengelola lembaga, struktur sumber pendanaan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kajian teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami tantangan pendanaan PAUD secara komprehensif serta memperkuat arah penelitian dalam merumuskan strategi pengelolaan pendanaan yang efektif, efisien, dan inovatif. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya dalam artikel ini dapat dikembangkan berdasarkan kerangka teoretis yang telah disusun, meskipun hipotesis penelitian tidak dinyatakan secara eksplisit namun tersirat pada analisis yang dilakukan.

3. METODOLOGI PENULISAN

Artikel ini disusun menggunakan metode penulisan berbasis studi pustaka (library research) yang diperkaya dengan pengamatan langsung secara umum terhadap kondisi lembaga PAUD di lingkungan masyarakat. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku-buku manajemen pembiayaan pendidikan, jurnal nasional terindeks yang membahas pendanaan PAUD, artikel akademik mengenai pengelolaan BOP PAUD, serta regulasi pemerintah termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Literatur-literatur tersebut dipilih secara selektif, terutama sumber-sumber yang terbit dalam lima tahun terakhir, untuk memastikan bahwa gagasan dan data yang digunakan dalam artikel ini relevan dengan situasi aktual pendanaan PAUD di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pendanaan Lembaga PAUD

Lembaga PAUD memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, namun makalah menunjukkan bahwa porsi terbesar berasal dari iuran orang tua, yang menyumbang 70–80% dari total pendapatan lembaga PAUD pada umumnya. Besarnya ketergantungan terhadap orang tua berhubungan langsung dengan kondisi bahwa mayoritas PAUD berstatus swasta dan tidak dibiayai penuh oleh pemerintah. Bantuan operasional dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD memang tersedia, tetapi penyalurannya tidak merata untuk semua lembaga. Ada lembaga yang menerimanya secara rutin, namun ada pula yang tidak pernah atau hanya sesekali menerima dana tersebut.

Selain BOP, lembaga PAUD juga berpotensi memperoleh dana dari yayasan, masyarakat, atau program CSR dari perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan uraian makalah, dukungan dari sektor swasta masih sangat minim. Banyak perusahaan besar lebih berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam penyaluran CSR mereka sehingga sektor PAUD kurang memperoleh perhatian. Dengan demikian, sumber pendanaan PAUD masih belum beragam, dan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua peserta didik.

Permasalahan dalam Pendanaan PAUD

Makalah menjelaskan bahwa permasalahan utama pendanaan PAUD bersumber dari ketidakseimbangan antara kebutuhan operasional dan dana yang tersedia. Ketika BOP tidak mencukupi atau tidak diterima, lembaga mengandalkan iuran orang tua yang besarnya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini menciptakan situasi rentan, karena ketika kondisi ekonomi orang tua melemah, pemasukan lembaga turut menurun sehingga mengganggu stabilitas operasional.

Keterlambatan penyaluran BOP juga menjadi masalah yang sering terjadi. Beberapa lembaga menerima BOP di pertengahan semester, bahkan ada yang menerima setelah kegiatan berjalan cukup lama, sehingga lembaga kesulitan merencanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Akibatnya, beberapa kebutuhan yang sifatnya mendesak seperti alat permainan edukatif, perbaikan fasilitas, dan kegiatan pembelajaran harus ditunda.

Permasalahan lain yang diuraikan adalah rendahnya kesejahteraan pendidik PAUD. Karena dana terbatas, sebagian besar guru PAUD menerima honor jauh di bawah standar upah minimum. Rendahnya pendapatan berkontribusi pada tingginya pergantian pendidik (turnover), yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran dan stabilitas emosional anak. Selain itu, kurangnya pendanaan membuat lembaga PAUD sulit melakukan inovasi

pembelajaran dan menjalankan program holistik integratif yang seharusnya meliputi aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.

Strategi Pengelolaan dan Solusi Pendanaan PAUD

Makalah menyajikan sejumlah strategi untuk membantu lembaga PAUD mengatasi keterbatasan pendanaan. Salah satu strategi yang ditekankan adalah peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan RKAS yang realistis, prioritas penggunaan dana yang tepat, serta penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap lembaga. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa “proses pemberdayaan dilakukan melalui lima tahapan, yaitu penyadaran, edukasi, memberikan rasa aman, bimbingan dan dukungan, serta pemeliharaan hubungan.” Ketika pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka, partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan lembaga cenderung meningkat.

Selain penguatan tata kelola keuangan, makalah juga menguraikan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan. PAUD dapat mengembangkan berbagai bentuk usaha produktif seperti bazar, market day, kelas keterampilan, atau kerja sama kecil dengan UMKM lokal. Langkah lain yang direkomendasikan adalah program “orang tua asuh PAUD”, di mana orang tua yang mampu atau masyarakat umum dapat membantu membiayai anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program seperti ini efektif apabila dikomunikasikan dengan baik dan dikelola secara transparan. Dalam konteks ini, pentingnya kemitraan antara lembaga PAUD dan keluarga menjadi sangat relevan, karena “orang tua dan lembaga PAUD harus intens memberikan dan menerima informasi terkait anak atau melakukan kerja sama atau bermitra.”

Solusi lain yang diusulkan ialah membangun kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan material maupun nonmaterial. Kerja sama seperti sponsorship kegiatan, bantuan alat permainan edukatif, hingga pelatihan guru sangat membantu meningkatkan mutu layanan tanpa membebani biaya orang tua secara langsung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendanaan lembaga PAUD masih menghadapi tantangan besar yang bersumber dari ketergantungan yang sangat tinggi pada iuran orang tua, keterbatasan bantuan pemerintah, serta minimnya dukungan dari sektor swasta dan masyarakat. Ketidakkonsistenan penyaluran BOP, baik dari segi

ketepatan waktu maupun jumlah yang tidak sesuai kebutuhan operasional, menyebabkan lembaga PAUD harus menutupi berbagai kekurangan dengan mengandalkan kontribusi orang tua. Situasi ini menjadikan lembaga PAUD berada dalam posisi rentan, terutama ketika kemampuan ekonomi keluarga menurun atau ketika pembayaran iuran tidak teratur.

Keterbatasan pendanaan membawa dampak langsung terhadap kualitas layanan PAUD, termasuk minimnya sarana prasarana, kurangnya alat permainan edukatif, rendahnya upah guru, serta terhambatnya inovasi pembelajaran dan pelaksanaan layanan holistik integratif. Ketidacukupan dana juga membuat lembaga sulit mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga memengaruhi stabilitas kegiatan belajar mengajar dan kualitas perkembangan anak. Oleh karena itu, persoalan pendanaan PAUD bukan hanya menyangkut jumlah dana yang diperoleh, tetapi juga sistem pengelolaan keuangan lembaga, kemampuan membangun kemitraan, serta kreativitas dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk menjamin keberlanjutan layanan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan lembaga PAUD untuk mengurangi ketergantungan pada iuran orang tua dengan mengoptimalkan strategi pendanaan kreatif yang telah dijelaskan dalam makalah, seperti pengembangan unit usaha lembaga, penyelenggaraan bazar atau market day, kerja sama dengan UMKM atau pihak swasta, serta program orang tua asuh bagi anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pengelola PAUD perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan agar kepercayaan orang tua dan masyarakat semakin kuat, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan eksternal. Lembaga juga diharapkan membangun kemitraan yang lebih luas dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, sehingga keberlanjutan pendanaan dapat terjaga dan kualitas layanan PAUD semakin meningkat.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pendidikan anak usia dini 2023.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi pendidikan. Erlangga.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. (2023). Pedoman pengelolaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD. <https://pauddikmas.kemdikbud.go.id>
- Fattah, N. (2012). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. PT Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, I., & Benty, D. D. N. (2017). Manajemen pendidikan: Suatu pengantar praktik. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, 1(1), 1–12.

- Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. (2023). Profil PAUD Indonesia 2023. <https://www.himpaudi.org>
- Ikatan Guru PAUD Indonesia. (2023). Survei kesejahteraan pendidik PAUD Indonesia. <https://www.igtki.or.id>
- Jurnal Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang. (2020–2025). Berbagai artikel tentang manajemen PAUD. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Kebijakan Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Data pokok PAUD Indonesia tahun 2023. <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>
- Matin. (2014). Manajemen pembiayaan pendidikan: Konsep dan aplikasinya. PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2011). Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). Konsep pembiayaan pendidikan. Ar-Ruzz Media.
- Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Nurhasanah, S., & Nuraeni, Y. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 1234–1244. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.812>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (2014).
- Putra, W. T., & Ismaniar. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Jurnal Family Education, 1(2), 47–57.
- Putri, L. D., Kamil, M., Hatimah, I., & Ardiwinata, J. S. (2023). Blended learning model in partnership of PAUD institution with family through parenting class in developing the potential of early children. KOLOKIU: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.24036/kolokium.v11i1.594>
- Ramadhani, P. R., Sulistyowati, E., & Wulandari, R. (2023). Implementasi pengelolaan dana BOP pada lembaga PAUD di Kota Semarang. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 7(1), 45–58.
- Safitri, N. A., Wulandari, D., & Sari, M. K. (2025). Manajemen pembiayaan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah PAUD, 10(1), 78–92.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).

- Wulaningsih, A. T., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di lembaga PAUD. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 19(2), 156–168.